

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, ANGKA
HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF, RATA-
RATA LAMA SEKOLAH, PENGELUARAN
PERKAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh

MERNA KUMALASARI

NIM. C2B607038

**Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Semarang
2011**

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, ANGKA
HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF, RATA-
RATA LAMA SEKOLAH, PENGELUARAN
PERKAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh

MERNA KUMALASARI

NIM. C2B607038

**Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Semarang
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Merna Kumalasari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA
MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA
SEKOLAH, PENGELUARAN PERKAPITA
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH**

Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, Msc

Semarang, 9 Agustus 2011

Dosen Pembimbing,



(Dr. Dwisetia Poerwono, Msc)

NIP. 19551208 198003 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Merna Kumalasari
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI,
ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA
MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA
SEKOLAH, PENGELUARAN PERKAPITA
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2011

Tim Peguji:

1. Dr. Dwisetia Poerwono, Msc

()

2. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, Msc., Ph.D

()

3. Drs. Nugroho SBM, Msp

()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Merna Kumalasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

(Merna Kumalasari)

NIM: C2B607038

ABSTRAK

Salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) model, dengan menggunakan data *time series* selama lima tahun (2005-2009) dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan LSDV model diharapkan dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah observasi yang memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan peningkatan derajat bebas (df).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah”, sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lepas dari dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si,Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang diberikan.
4. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, Msc selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, serta dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
5. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang diberikan.

6. Kedua orang tua, Ayah Susanto dan Ibu Maemanah terimakasih banyak atas doa, kasih sayang, serta dorongan semangat yang telah diberikan.
7. Kakak dan adikku, Meta onnie dan Mia terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan.
8. Sahabat-sahabatku Linda, Angke, Yulianita, Arfita, Putria, Lina, Mendy, Novi, Hanandhita, Litha, Faris, terimakasih atas doa dan perhatian kalian.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan IESP 2007, Dinar, Arjanggal, Betty, Wisnu, Dita, Margin, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama empat tahun ini.
10. Mbak Lira, Mbak Nia, Mbak Ayu, Dewi, Viki, Hendy terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.
11. Kepada pihak-pihak yang terkait yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 9 Agustus 2011

Penulis,

Merna Kumalasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan	16
1.3.2 Kegunaan	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Konsep & Definisi Kemiskinan	18
2.1.2 Ukuran Kemiskinan	22
2.1.3 Penyebab Kemiskinan	23
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	26
2.1.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	32
2.1.6 Angka Harapan Hidup	33
2.1.7 Hubungan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan	34

	Halaman
2.1.8 Angka Melek Huruf	34
2.1.9 Hubungan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan	35
2.1.10 Rata-rata Lama Sekolah	35
2.1.11 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan	36
2.1.12 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	37
2.1.13 Hubungan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan terhadap Tingkat Kemiskinan	38
2.1.14 Jumlah Penduduk	39
2.1.15 Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan	41
2.2 Penelitian Terdahulu	43
2.3 Kerangka Pemikiran	52
2.4 Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	55
3.2 Jenis dan Sumber Data	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	57
3.4 Metode Analisis	57
3.4.1 Estimasi Model	60
3.4.2 Asumsi Model Regresi Linier Klasik	65
3.4.2.1 Deteksi Multikolinearitas	66
3.4.2.2 Deteksi Heteroskedastisitas	67
3.4.2.3 Deteksi Autokorelasi	67
3.4.3 Uji Statistik	68
3.4.3.1 Uji Individual (uji t)	68
3.4.3.2 Pengujian Secara Serentak (uji F)	70
3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	72

	Halaman
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	73
4.1.1 Keadaan Geografis	73
4.1.2 Tingkat Kemiskinan	74
4.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi	77
4.1.4 Angka Harapan Hidup	79
4.1.5 Angka Melek Huruf	82
4.1.6 Rata-Rata Lama Sekolah	84
4.1.7 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	86
4.1.8 Jumlah Penduduk	88
4.2 Analisis Data	90
4.2.1 Asumsi Model Regresi Linier Klasik	92
4.2.1.1 Deteksi Multikolinearitas	92
4.2.1.2 Deteksi Heteroskedastisitas	93
4.2.1.3 Deteksi Autokorelasi	94
4.2.2 Uji Statistik	95
4.2.2.1 Uji Individual (uji t)	95
4.2.2.2 Pengujian Secara Serentak (uji F)	97
4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)	98
4.3 Intepretasi Hasil dan Pembahasan	98
4.3.1 Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	101
4.3.2 Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan	104
4.3.3 Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan	105
4.3.4 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan	107

	Halaman
4.3.5 Pengaruh Pendapatan Perkapita Disesuaikan Terhadap Tingkat Kemiskinan	108
4.3.6 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan	109
4.3.7 Pengaruh Dummy Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Kemiskinan	114
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Keterbatasan	117
5.3 Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA	 120
LAMPIRAN A (Data, Indeks Gini, Garis Kemiskinan)	123
LAMPIRAN B (Hasil Regresi Utama, Hasil <i>Auxiliary Regression</i>)	131

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi Tahun 2005-2009	3
Tabel 1.2	Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2005-2009	10
Tabel 4.1	Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	75
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	78
Tabel 4.3	Angka Harapan Hidup Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	81
Tabel 4.4	Angka Melek Huruf Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	83
Tabel 4.5	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	85
Tabel 4.6	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	87
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	89
Tabel 4.8	Hasil Regresi Utama	91
Tabel 4.9	R^2 Hasil <i>Auxiliary Regression</i> Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	92
Tabel 4.10	Uji Park	93

Tabel 4.11	Hasil Regresi Dan Keputusan dari Hipotesis Atas Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	95
------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	4
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	6
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk di Jateng Tahun 2005-2009	13
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	54
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (persen)	102
Gambar 4.2	Angka Melek Huruf (AMH) dan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (persen)	106
Gambar 4.3	Jumlah Penduduk (juta orang) dan Tingkat Kemiskinan (persen) Di Jawa Tengah Tahun 2005-2009	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data, Indeks Gini, Garis Kemiskinan	123
Lampiran B	Hasil Regresi Utama, Hasil <i>Auxiliary Regression</i>	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan identik dengan negara sedang berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara sedang berkembang sulit untuk menjadi maju. Kesamaan karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya, tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat. Pendapatan perkapita negara sedang berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat yakni program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan yang paling miskin. Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu mengatasi masalah

kemiskinan. Investasi yang ditanamkan baik oleh lokal maupun asing saat ini, tidak bisa diandalkan untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan, adanya penggunaan mesin-mesin yang canggih sehingga hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Investasi yang dilakukan akan lebih baik jika bersifat padat karya, sehingga akan menambah kesempatan kerja bagi penduduk. Terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab seseorang menjadi miskin karena peluang untuk memperoleh pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *head count index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami kecenderungan yang menurun, yakni dari sebesar 16 persen pada tahun 2005 menjadi 14,20 persen pada tahun 2009 (BPS, 2010). Sementara itu, rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah periode 2005-2009 merupakan yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 20,01 persen (Tabel 1.1). Selanjutnya, ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 19,24 persen, berikutnya DIY dan Jawa Barat masing-masing 18,53 dan 13,21 persen. Peringkat kelima Banten dengan rata-rata 8,70 persen dan tingkat kemiskinan terendah DKI Jakarta 4,14 persen.

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Berdasarkan Provinsi Tahun 2005-2009

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-Rata *)
DKI Jakarta	3,61	4,57	4,61	4,29	3,62	4,14
Banten	8,86	9,79	9,07	8,15	7,64	8,70
Jabar	13,06	14,49	13,55	13,01	11,96	13,21
DIY	18,95	19,15	18,99	18,32	17,23	18,53
Jatim	19,95	21,09	19,98	18,51	16,68	19,24
Jateng	20,49	22,19	20,43	19,23	17,72	20,01

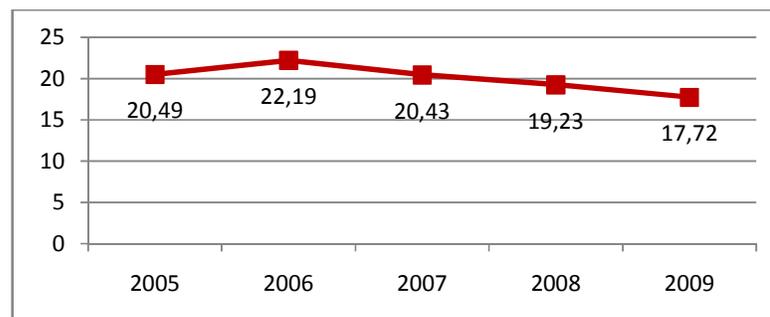
Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai tahun terbitan

Masalah kemiskinan bagi provinsi Jawa Tengah merupakan isu strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan, yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Makin Sejahtera”, yang dijabarkan dalam 6 Misi

$$*) = \frac{x}{n}$$

Pembangunan (Bappeda Jateng, 2011). Salah satu akumulasi keberhasilan dari pemerintahan Jawa Tengah, dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2008 sebanyak 19,23% dari jumlah penduduk. Tahun 2009, turun menjadi 17,72% dari jumlah populasi lebih dari 32 juta jiwa (Gambar 1.1). Namun demikian, meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan trend yang menurun, angkanya masih yang tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, Tahun 2005-2009



Sumber: BPS, Jateng Dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumahtangga, dan individu (World Bank, 2002).

Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Tengah sampai tahun 2009 menunjukkan arah yang positif dan menjadi prioritas sasaran pemerintah yang masih akan terus ditingkatkan, diantaranya meliputi

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia (bappeda Jateng, 2010). Dengan melihat perkembangan ekonomi makro tersebut dan untuk mengetahui lebih jauh pengaruh ekonomi makro terhadap perkembangan tingkat kemiskinan di Jateng, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas faktor penyebab kemiskinan berupa karakteristik makro.

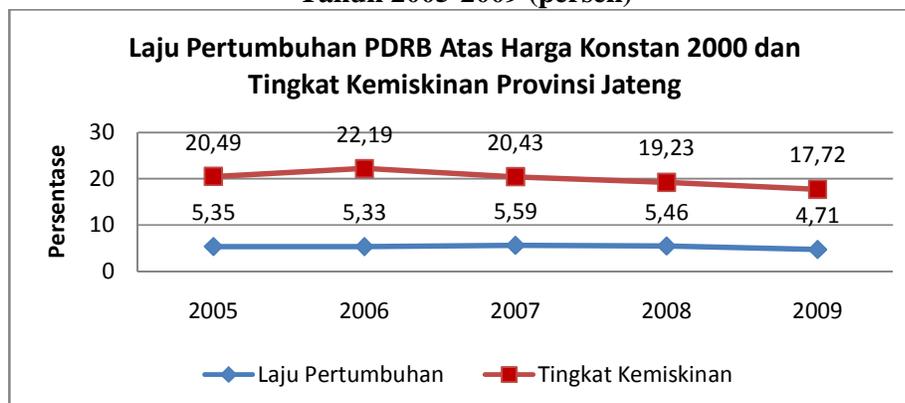
Bank Dunia dalam Laporan Monitoring Global tahun 2005 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran sentral dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global. Bisa dikatakan bahwa pengurangan penduduk miskin tidak mungkin dilakukan jika ekonomi tidak berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007)

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah periode 2005-2007 berjalan seiring dengan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (Gambar 1.2). Periode 2005-2006 saat laju pertumbuhan ekonomi menurun tingkat kemiskinan meningkat, sebaliknya pada periode 2006-2007 laju pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan menurun. Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2006

dikarenakan kebijakan pemerintah menaikkan BBM, hal ini berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah
Tahun 2005-2009 (persen)



Sumber: BPS, Jateng Dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Secara absolut, seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya berada dibawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diprosikan dengan garis kemiskinan. Suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan, ketika pertumbuhannya sangat lambat, lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun.

Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Jawa Tengah.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan, selain pertumbuhan ekonomi juga pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti pembangunan. Pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Amartya Sen (dikutip oleh Todaro dan Smith, 2006), membantu memperjelas mengapa para ahli ekonomi pembangunan telah menempatkan

penekanan yang begitu jelas terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar pendidikan dan kesehatan yang rendah sebagai kasus "pertumbuhan tanpa pembangunan". Pendapatan riil memang sangat penting, tetapi untuk mengkonversikan karakteristik komoditi menjadi fungsi yang sesuai, dalam banyak hal yang penting, jelas membutuhkan pendidikan dan kesehatan selain pendapatan. Peran pendidikan dan kesehatan berkisar mulai dari hal-hal dasar seperti tingkat nutrisi dan energi yang dibutuhkan seseorang, dimana kedua hal tersebut dapat diperoleh saat hidupnya bebas dari parasit, sampai pada kemampuan tingkat tinggi untuk menghargai kekayaan kehidupan manusia, yang dihasilkan oleh pendidikan yang memiliki cakupan luas dan mendalam. Hampir semua pendekatan tentang kesejahteraan berujung kepada pertimbangan terhadap kesehatan dan pendidikan, selain pendapatan. Analisis Sen adalah bagian dari apa yang disebut PBB sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Todaro dan Smith, 2006).

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 1991 yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM

dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan Provinsi Jateng tahun 2005-2009, cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Tabel 1.2
Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Provinsi Jateng Tahun 2005-2009

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (per tahun) (ribu rp)
2005	70,60	87,40	6,60	621,40
2006	70,80	88,24	6,80	621,75
2007	70,90	88,62	6,80	628,53
2008	71,10	89,24	6,86	633,59
2009	71,25	89,46	7,07	636,39

Sumber: BPS, indikator utama sosial, politik dan keamanan provinsi Jateng 2009

Dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Strategi pembangunan di sebagian besar negara memprioritaskan pada pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan dan support anggaran (subsidi) yang besar. Investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dalam perekonomian. Rasidin dan Bonar

(2005) menyatakan bahwa pada kenyataannya dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsubar Saleh (2002) menemukan bahwa pengaruh angka harapan hidup (AHH) dan rata-rata bersekolah (RS) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Apriliyah S. Napitulu (2007) dalam penelitian “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara” juga menemukan bahwa variabel angka harapan hidup, angka melek huruf dan konsumsi perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah populasi penduduk. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun demikian apabila

kualitasnya rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Sedangkan meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi banyak hal yaitu meningkatnya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Disamping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.

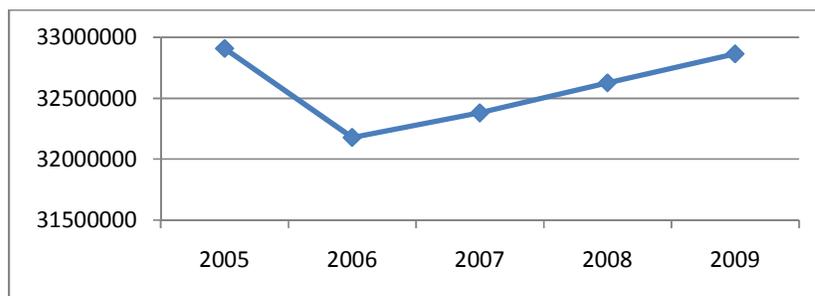
Ada tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yakni dampak-dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional. (Todaro dan Smith, 2006)

Pertambahan penduduk yang cepat cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama yang paling miskin, mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah penghematan anggaran pemerintah (misalnya, ketika pemerintah terpaksa membatasi dana untuk program-program kesehatan dan pendidikan). Jika ada bencana alam atau kerusakan lingkungan, mereka pula yang paling dan yang pertama merasakan akibatnya, nasib serupa juga mereka alami ketika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami kemerosotan. Jika keluarga-keluarga miskin itu memiliki banyak anggota, maka memburuknya

kemiskinan mereka dengan sendirinya akan diikuti dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Peningkatan jumlah populasi penduduk akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk di Jawa Tengah Tahun 2005-2009



Sumber: BPS, Jateng Dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 32.864.563 jiwa mengalami kenaikan, dibanding tahun 2005 sebanyak 32.908.850 jiwa. Terkait dengan kesejahteraan penduduk terlihat tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 20,49 persen (6.743.023 penduduk miskin) pada tahun 2005, turun menjadi 17,72 persen (5.823.600 penduduk miskin) pada tahun 2009.

Kemiskinan merupakan masalah dasar, dimana setiap daerah pasti terdapat penduduk miskin. Seperti yang diungkapkan sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan ekonomi (IPM) dan jumlah penduduk. IPM memiliki 4 komponen yang masing-masing menggambarkan capaian

pembangunan di bidang kesehatan (angka harapan hidup), bidang pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan kesejahteraan masyarakat (pengeluaran perkapita disesuaikan). Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai kemiskinan di Jawa Tengah oleh Adit Agus A. (2010), Ari Widiastuti (2010) dan Ravi Dwi W. (2010) hanya menggunakan satu dari empat komponen IPM yaitu angka melek huruf. Jika kemiskinan berkaitan dengan sempitnya kesempatan yang dimiliki maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut dari masing-masing komponen indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di latar belakang diketahui bahwa tingkat kemiskinan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (yang terdiri atas 4 komponen yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita) dan jumlah penduduk. Penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar sedangkan kemiskinan adalah sebaliknya. Kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan

kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007). Amartya Sen (dikutip oleh Todaro dan Smith) mengungkapkan bahwa hampir semua pendekatan tentang kesejahteraan berujung pada pertimbangan terhadap kesehatan dan pendidikan selain pendapatan. Analisis Sen adalah bagian dari apa yang disebut PBB sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun demikian apabila kualitasnya rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Hermanto dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Jawa Tengah telah mencapai beberapa akumulasi keberhasilan pembangunan selama periode 2005-2009, yakni dapat dilihat dari: pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan Jawa Tengah yang cenderung meningkat di setiap tahunnya. Disisi lain ditemukan juga kondisi bahwa tingkat kemiskinan Jateng selama periode 2005-2009 menunjukkan trend yang menurun yakni 20,49 persen di tahun 2005, turun menjadi 17,72 persen di tahun 2009. Jadi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meskipun tingkat kemiskinan Jateng cenderung menurun, namun rata-rata persentase tingkat kemiskinannya selama periode 2005-2009 yakni sebesar 20,01% (Tabel 1.1), masih merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata

lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan, serta jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan , serta jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

1.3.2 Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintahan yang terkait seperti kementerian sosial, kementerian koordinator kesejahteraan rakyat, dan khususnya dinas sosial provinsi Jawa Tengah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan, serta jumlah penduduk terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

1.4 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

Menurut BPS (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi

rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (wikipedia, 2010).

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Hal ini tergantung tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga pada akses ke layanan. Ini termasuk kurangnya penghasilan dan sumber daya produktif untuk menjamin penghidupan berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, terbatas atau kurangnya akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan kematian dari penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, diskriminasi sosial dan eksklusi. Hal ini juga ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Sosial, 2010).

Kemiskinan menurut Drewnowski (Epi Supiadi, 2003), mencoba menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingkat-tingkat kehidupan (*the level of living index*). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

- a. Kehidupan fisik dasar (*basic fisical needs*), yang meliputi gizi/ nutrisi, perlindungan/ perumahan (*shelter/ housing*) dan kesehatan.
- b. Kebutuhan budaya dasar (*basic cultural needs*), yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (*social security*).
- c. *High income*, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya (Ichwanmuis, 2011).

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Todaro dan Smith (2006) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

$\% PM_p$: Persentase penduduk miskin di provinsi p

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p : Jumlah penduduk di provinsi p

Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2 per hari masuk dalam kategori miskin (worldbank, 2009).

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata
4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.

6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan disuatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup.

Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur.

Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera, maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya. Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai, maka akan segera dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan (termasuk keterampilan), tingkat kesehatan yang

rendah dan terbatasnya fasilitas umum merupakan penyebab dari adanya kemiskinan.

Bank Dunia (*World Bank*) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab kedalam kemiskinan.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Robert Solow (dikutip oleh Todaro dan Smith, 2006), mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai Model Pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha} \dots\dots\dots (2.2)$$

dimana Y adalah pendapatan domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia (akumulasi pendidikan dan pelatihan), L adalah tenaga kerja, dan A merupakan produktivitas tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Faktor penting yang mempengaruhi modal fisik adalah investasi. Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia).

Menurut Mankiw (2004) suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya *ceteris paribus* akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang.

Menurut Simon Kuznets (dikutip dari Boediono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).

2. persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. pola persebaran penduduk.

Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:

1. proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Todaro dan Smith (2006), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. **Akumulasi modal** termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai

dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.

2. **Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.** Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
3. **Kemajuan Teknologi.** Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
 - b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama

- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup sering digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005).

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang

dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 2005).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

2.1.5 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun

syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

2.1.6 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

2.1.7 Hubungan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

2.1.8 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen

atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.1.9 Hubungan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Selanjutnya Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

2.1.10 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang

pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.1.11 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

2.1.12 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita disesuaikan merupakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal. Pengeluaran perkapita disesuaikan memberikan gambaran tingkat daya beli (PPP) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. PPP (*Purchasing Power Parity*) memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

$$C(I) = C_{(i)} \quad \text{jika } C_{(i)} < Z \dots\dots\dots (2.3)$$

$$= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} \quad \text{jika } Z < C_{(i)} < 2Z \dots\dots\dots (2.4)$$

$$= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} \quad \text{jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \dots\dots\dots (2.5)$$

dan seterusnya.

Dimana:

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat penegluran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.000 per kapita per tahun atau Rp 1500 per kapita per hari.

Penghitungan paritas daya beli (PPP) dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok, antara lain beras lokal, tepung terigu, singkong, tuna, teri, daging sapi, ayam, telur, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, pepaya, kelapa, gula, kopi, garam, merica, mie instan, rokok kretek, listrik, air minum, bensin, minyak tanah, dan sewa rumah.

2.1.13 Hubungan Pengeluaran Perkapita disesuaikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Terdapat tiga dimensi dari ukuran kualitas hidup manusia yakni pertama dimensi kesehatan, kedua dimensi pendidikan dan yang ketiga adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Penelitian Apriliyah (2007) menunjukkan bahwa konsumsi perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

2.1.14 Jumlah Penduduk

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996).

Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Lipsey (dalam Ida BM, 2003) pada tingkat pengetahuan dan ketersediaan faktor produksi tertentu, jumlah penduduk dapat berpengaruh pada tingkat output perkapita. Setiap orang semasa hidupnya akan sekaligus menjadi konsumen dan produsen. Karena jumlah penduduk berkaitan dengan pendapatan perkapita, maka dapat didefinisikan suatu konsep teoritis, yaitu populasi optimal yang memaksimumkan pendapatan perkapita.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru yang dapat disetujui kedua belah pihak. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen (dalam Todaro dan Smith, 2006) yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk bukan merupakan penyebab utama rendahnya taraf hidup masyarakat, kesenjangan pendapatan atau terbatasnya kebebasan dalam membuat pilihan yang merupakan masalah pokok dalam suatu negara.
2. Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil.
3. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat, meskipun bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari hal itu merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara.

Pertumbuhan penduduk ditentukan oleh empat faktor, kelahiran (B), kematian (D), imigran (I), dan emigran (E).

$$P = B - D + IE \dots\dots\dots(2.6)$$

Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk periode dapat dihitung dalam dua bagian, pertumbuhan alami penduduk (BD) dan pertumbuhan populasi mekanik (IE), dimana mekanik pertumbuhan penduduk terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, misalnya ekonomi maju tumbuh lebih cepat sedangkan ekonomi terbelakang tumbuh perlahan bahkan dengan pertumbuhan negatif.

2.1.15 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Teori siklus populasi kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006) merupakan argumen utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Model dasar yang digunakan oleh para ekonom untuk medemonstrasikan konsekuensi negatif dari cepatnya laju pertumbuhan penduduk adalah sebuah simplikasi dari persamaan pertumbuhan neoklasik Solow standar.

Dengan menggunakan fungsi produksi dasar $Y = f(K, L, R, T)$, yakni output merupakan fungsi dari modal, tenaga kerja, sumber daya (bahan mentah atau bahan baku), dan teknologi, serta dengan asumsi bahwa ketersediaan sumberdaya itu konstan, maka dapat diperoleh rumus:

$$y - l = \alpha (k-l) + t \dots\dots\dots (2.7)$$

dimana:

y = tingkat pertumbuhan GNI

l = tingkat pertumbuhan angkatan kerja (penduduk)

k = tingkat pertumbuhan stok modal

α = elastisitas output dari modal

t = dampak perubahan teknologi

Dengan asumsi tingkat pengembalian yang konstan, maka pada dasarnya persamaan 2.7 menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita ($y-l$) langsung berkaitan secara proporsional dengan tingkat pertumbuhan rasio modal-tenaga kerja ($k-l$) ditambah dampak residual kemajuan teknologi termasuk meningkatnya modal fisik dan sumberdaya manusia). Oleh karena itu, ditengah ketiadaan perubahan atau kemajuan teknologi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk (l), maka tingkat cadangan atau stok modal (k) dari masyarakat yang bersangkutan juga harus semakin tinggi, dan itu berarti dibutuhkan tingkat tabungan dan tingkat investasi yang lebih tinggi hanya demi mempertahankan tingkat pendapatan perkapita secara konstan. Jika tingkat pendapatan yang rendah mendorong keluarga miskin untuk menambah jumlah anak, karena anak dianggap sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari

tua, padahal keluarga besar berarti pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, beban ketergantungan yang semakin berat, tingkat tabungan yang kian menyusut, tingkat investasi yang semakin merosot, pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat, dan akhirnya tingkat ekonomi yang semakin parah. Dengan demikian, argumen ini secara tegas memandang pertumbuhan penduduk sebagai penyebab sekaligus akibat keterbelakangan.

Parahnya kemiskinan absolut serta rendahnya taraf hidup mendorong terciptanya keluarga-keluarga besar, sedangkan keluarga besar menghambat pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih merata merupakan syarat untuk meredakan atau menghentikan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermanto & Dwi W. (2007), Wongdesmiwati (2009), dan Ari Widiastuti (2010), jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

2.2 Penelitian Terdahulu

Samsubar Saleh (2002), dalam jurnal “Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia”. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1996 dan 1999. Model yang digunakan pertama, model estimasi dengan menggunakan data *cross section* ($POV_i = \alpha + \lambda X_i^j + \varepsilon_i$). Sedangkan model yang kedua, merupakan model estimasi dengan menggunakan data panel ($POV_{it} = \alpha_{it} + \gamma_i X_{it}^j + \varepsilon_{it}$), dimana POV adalah variabel terikat sedangkan X^j adalah variabel

penjelas, i dan t adalah propinsi ke- i dan waktu ke- t . Variabel penjelas yang digunakan adalah:

- a. YPC adalah tingkat pendapatan per kapita per provinsi (dalam puluhan ribu rupiah).
- b. IMP adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi sumberdaya manusia per kapita per provinsi (dalam ribu rupiah), (penjumlahan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan YME; sektor kesehatan, kesejahteraan, peranan wanita, anak, dan remaja; sektor tenaga kerja; dan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi).
- c. IFP adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita per provinsi (dalam ribuan rupiah).
- d. HH adalah angka harapan hidup (dalam tahun)
- e. MH adalah angka melek huruf persentase dari total penduduk
- f. RS adalah rata-rata lama bersekolah penduduk (dalam tahun).
- g. HDI adalah indeks pembangunan manusia (IPM)
- h. GEI adalah indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik atau *gender empowerment index* atau lebih tepat diistilahkan *women empowerment index*.
- i. RG adalah rasio gini (dalam persen).
- j. PNH adalah rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap fasilitas kesehatan (dalam persen).
- k. PNW adalah rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih.

1. DT adalah variabel boneka untuk waktu (*dummy variable time*) yang mencerminkan sebelum dan sesudah terjadinya krisis. Nilai 0 untuk tahun 1996 dan nilai 1 untuk tahun 1999.

Hasil penelitian ini adalah pendapatan perkapita (YPC) ternyata berpengaruh negatif terhadap rasio kemiskinan. Kesenjangan pendapatan (RG) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Angka harapan hidup (AHH) dan rata-rata bersekolah (RS) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Indeks pembangunan manusia (HDI) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi sumberdaya manusia (IMP) oleh pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Investasi fisik (IFP) signifikan namun dengan arah yang tidak diharapkan yaitu positif. Tingkat partisipasi politik dan ekonomi dari perempuan (GEI) signifikan namun dengan arah yang juga tidak diharapkan, yaitu positif. Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas kesehatan (PNH) ternyata signifikan dan positif pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, populasi penduduk yang tidak mempunyai akses pada air bersih (PAW) signifikan, namun dengan arah yang tidak diharapkan yaitu negatif.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Model yang digunakan $POVERTY_{ij} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POPPULASI_{ij} + \beta_3 AGRISHARE_{ij} +$

$\beta_4 \text{INDUSTRISHARE}_{ij} + \beta_5 \text{INFLASI}_{ij} + \beta_6 \text{SMP}_{ij} + \beta_7 \text{SMA}_{ij} + \beta_8 \text{DIPLM}_{ij} + \beta_9 \text{DUMMYKRISIS}_{ij} + \delta_{ij}$. Jumlah orang miskin (POVERTY) diduga dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), jumlah populasi penduduk (POPULASI), pangsa sektor pertanian dalam PDRB (AGRISHARE), pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB (INDUSTRISHARE), tingkat inflasi (INFLASI), jumlah lulusan sekolah setingkat SMP (SMP), jumlah lulusan sekolah setingkat SMA (SMA), jumlah lulusan sekolah setingkat diploma (DIPLM), dan *dummy* krisis ekonomi (DUMMY KRISIS). Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relative kecil. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005), dalam jurnal “Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Petumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium”, menggunakan metode *Computable General Equilibrium* (CGE), dan *Foster-Greer-Thorbecke method*. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan

sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki persentase yang lebih besar.

Pradeep Agrawal (2008), dalam jurnal “*Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhtan*”. Penelitian ini menggunakan metode panel data untuk setiap provinsi di Kazakhtan selama periode 2000-2002 dengan *fixed effect model* (FEM). Model yang digunakan:

$$\Delta \text{poverty} = \text{growth} + \text{equality} + \text{unemployment} + \text{wages}$$

Poverty : kemiskinan

Growth : pertumbuhan ekonomi

Equality : ketimpangan distribusi pendapatan

Unemployment : pengangguran

Wages : tingkat upah

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Ketimpangan yang menurun tajam selama periode pertumbuhan tinggi (1998-2003) juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan.

Wongdesmiwati (2009) dalam jurnal “*Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga 2004. Model yang digunakan:

$$\text{Log } Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X1_i + \beta_2 \text{Log}X2_i + \beta_3 \text{Log}X3_i + \beta_4 \text{Log}X4_i + \beta_5 \text{Log}X5_i + \beta_6 \text{Log}X6_i + u_i.$$

Y_i : jumlah penduduk miskin

$X1_i$: jumlah penduduk Indonesia per tahun

$X2_i$: PDB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi

$X3_i$: angka harapan hidup

$X4_i$: persentase angka melek huruf

$X5_i$: persentase penggunaan listrik

$X6_i$: persentase konsumsi makanan.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Adit Agus Prastyo (2010) dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) untuk setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama periode 2003-2007. Model yang digunakan:

$$K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Y_{it} + \alpha_2 U_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 P_{it} + u_{it}$$

K : tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah

U : upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah

PD : pendidikan kabupaten/kota di Jawa Tengah

P : tingkat pengangguran kabupaten/kota di Jawa Tengah

Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Apriliyah S. Napitulu (2007) dalam penelitian “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembanguna Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), data yang digunakan berupa data time series dari tahun 1990 sampai 2004. Model yang digunakan:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + u$$

Y : jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)

X₁ : angka harapan hidup (tahun)

X₂ : angka melek huruf (persen)

X₃ : konsumsi perkapita

Hasil dari penelitian ini adalah variabel angka harapan hidup, angka melek huruf dan konsumsi perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Ari Widiastuti (2010) dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”. Penelitian ini menggunakan metode panel data yang terdiri dari time series periode 2004-2008

dan data cross section 35 kabupaten/kota Jawa Tengah dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM). Model yang digunakan:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 GRW_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 AMH_{it} + \beta_4 DF_{it} + u_{it}$$

KM : jumlah penduduk miskin

GRW: pertumbuhan ekonomi

JP : jumlah penduduk

AMH: angka melek huruf

DF : desentralisasi fiskal

Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Ravi Dwi Wijayanto (2010) dalam penelitian “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear panel data dengan metode FEM. Model yang digunakan:

$$\text{Log}KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}PDRB_{it} + \beta_2 \text{Log}MH_{it} + \beta_3 \text{Log}PG_{it} + \alpha_4 P_{it} + u_{it}$$

KM : persentase kemiskinan dalam persen

PDRB : laju PDRB harga konstan 2000 dalam persen

MH : pendidikan atau angka melek huruf dalam persen

PG : pengangguran dalam persen

Hasil dari penelitian ini adalah variabel PDRB menunjukkan tanda negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tingkat

melek huruf dan variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nur Tsaniyah (2010) dalam penelitian “Proyeksi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus: 30 Provinsi)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Model yang digunakan:

$$\text{KMSKN}_{it} = \alpha_{0i} + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{AHH}_{it} + U_i$$

KMSKN : tingkat kemiskinan provinsi

PDRB : PDRB per kapita provinsi

AHH : angka harapan hidup provinsi

Hasil penelitian ini adalah variabel PDRB per kapita dan variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada kesamaan variabel yang digunakan peneliti dalam melihat perkembangan kemiskinan disuatu daerah, dan variabel yang paling banyak digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, komponen indeks pembangunan manusia (yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita), jumlah penduduk dan jumlah pengangguran.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab kemiskinan pada umumnya dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di suatu daerah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2006), penyebab kemiskinan di suatu negara berkembang diakibatkan oleh interaksi dari tingkat pendapatan nasional yang rendah, pendapatan perkapita yang masih

rendah, distribusi pendapatan yang timpang, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan terakhir fasilitas pendidikan di kebanyakan negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar, 2006).

Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama (diukur dengan angka harapan hidup), dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi (Lincoln, 1999).

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam

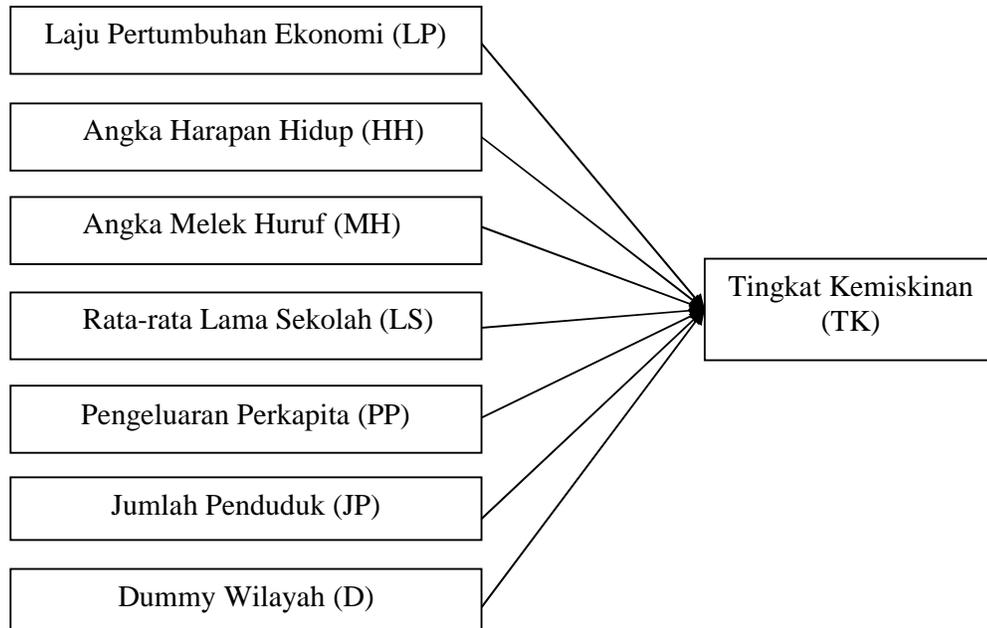
menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi angka kecakapan baca tulis semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM.

Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln, 1999).

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Penelitian Apriliyah (2007) menunjukkan bahwa konsumsi perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

1. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Angka Melek Huruf berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
5. Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
6. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
7. Terdapat perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan antara Kota Semarang (*benchmark*) dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jateng.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan Jateng sebagai variabel dependen, sedangkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita disesuaikan, dan jumlah penduduk. Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan PDRB pada tahun t dengan tahun $t-1$ atas harga konstan 2000 di masing-masing kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.
- Angka harapan hidup adalah umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jateng tahun 2005-2009 (dalam satuan tahun), data diambil dari BPS.
- Angka melek huruf adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia

15 tahun ke atas, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jateng tahun 2005-2009 (dalam satuan persen), data diambil dari BPS.

- Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jateng tahun 2005-2009 (dalam satuan tahun), data diambil dari BPS.
- Pengeluaran perkapita disesuaikan adalah pengeluaran perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal (per tahun) (dalam satuan ribu rupiah), tahun 2005-2009. Data diambil dari BPS.
- Jumlah Penduduk Jateng adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Jateng selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data diambil dari BPS.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang dilakukan oleh pihak lain berupa bahan tulisan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka terbitan BPS. Selain itu data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2005-2009 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 175 observasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik dan situs resmi Bappeda Jateng.

3.4 Metode Analisis

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel (variabel terikat) terhadap variabel lain (variabel bebas) tidak hanya bersifat seketika. Seperti sering suatu variabel bereaksi terhadap variabel lain dengan suatu selang waktu atau “lag”. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model panel data.

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana N adalah banyaknya data cross section

Sedangkan persamaan model time series adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana T adalah banyaknya data time series

Oleh karena data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka persamaanya menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana:

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyaknya data panel

Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. Berikut adalah keunggulan metode data panel seperti yang disebutkan oleh Wibisono (dikutip oleh Shochrul dkk, 2011):

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat bebas (*degrees of freedom-df*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel.

Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data panel, sebagai berikut (Gujarati, 2003):

1. *Pooled least square (PLS)*.

Mengestimasi data panel dengan metode OLS. Pendekatan PLS secara sederhana menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section*. Model data panel untuk PLS adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

2. *Fixed effect (FE)*.

Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted-variables, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model dengan FE menambahkan variabel dummy untuk mengizinkan adanya perubahan intersep ini. Model data panel untuk FE adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

3. *Random effect (RE)*.

Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari *cross section* dan *time series*. Model RE adalah

variasi dari estimasi *generalized least square* (GLS). Model data panel untuk RE adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(3.6)$$

3.4.1 Estimasi Model

Penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel laju pertumbuhan ekonomi (LP), angka harapan hidup (HH), angka melek huruf (MH), rata-rata lama sekolah (LS), pengeluaran perkapita (PP) dan jumlah penduduk (JP) terhadap tingkat kemiskinan (TK) menggunakan data *time series* selama lima tahun yang diwakili data tahunan dari 2005-2009 dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 175 observasi.

Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TK = f(LP, HH, MH, LS, PP, JP) \dots\dots\dots(3.7)$$

dimana:

- TK : tingkat kemiskinan/tahun
- LP : laju pertumbuhan ekonomi/tahun
- HH : angka harapan hidup/tahun
- MH : angka melek huruf/tahun
- LS : rata-rata lama sekolah/tahun
- PP : pengeluaran perkapita/tahun
- JP : jumlah penduduk/tahun

Sehingga persamaanya:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LP_{it} + \beta_2 HH_{it} + \beta_3 MH_{it} + \beta_4 LS_{it} + \beta_5 PP_{it} + \beta_6 JP_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(3.8)$$

dimana:

TK : tingkat kemiskinan/tahun

LP : laju pertumbuhan ekonomi/tahun

HH : angka harapan hidup/tahun

MH : angka melek huruf/tahun

LS : rata-rata lama sekolah/tahun

PP : pengeluaran perkapita/tahun

JP : jumlah penduduk/tahun

i : *cross section*

t : *time series*

β_0 : konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: koefisien

u : gangguan

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel-variabel laju pertumbuhan ekonomi (LP), angka harapan hidup (HH), angka melek huruf (MH), rata-rata lama sekolah (LS), pengeluaran perkapita (PP) dan jumlah penduduk (JP) terhadap tingkat kemiskinan (TK) menggunakan metode FEM (*fixed effect model*) dikarenakan N (jumlah observasi) besar dan T (jumlah waktu) kecil selain itu bahwa unit *cross section* yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak (Gujarati, 2003).

Estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada estimasi yang digunakan pada *intercept*, koefisien slope, dan *disturbance term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu:

1. Asumsi bahwa *intercept* dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *disturbance term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
2. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu
3. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
4. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
5. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, pengaruh laju pertumbuhan ekonomi (LP), angka harapan hidup (HH), angka melek huruf (MH), rata-rata lama sekolah (LS), pengeluaran perkapita (PP) dan jumlah penduduk (JP) terhadap tingkat kemiskinan (TK) di Jawa Tengah tahun 2005-2009 digunakan asumsi FEM yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan intersep, dan persamaannya disebut sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Penelitian ini menggunakan dummy wilayah untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun periode penelitian (tahun 2005-2009) dimana Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Hal ini dikarenakan, Kota

Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Setelah memasukkan variabel dummy wilayah maka persamaan 3.8 menjadi:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LP_{it} + \beta_2 HH_{it} + \beta_3 MH_{it} + \beta_4 LS_{it} + \beta_5 PP_{it} + \beta_6 JP_{it} + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34} + u_{it} \dots\dots\dots (3.9)$$

dimana:

- TK : tingkat kemiskinan/tahun
- LP : laju pertumbuhan ekonomi/tahun
- HH : angka harapan hidup/tahun
- MH : angka melek huruf/tahun
- LS : rata-rata lama sekolah/tahun
- PP : pengeluaran perkapita/tahun
- JP : jumlah penduduk/tahun
- D₁ : dummy Kabupaten Cilacap
- D₂ : dummy Kabupaten Banyumas
- D₃ : dummy Kabupaten Purbalingga
- D₄ : dummy Kabupaten Banjarnegara
- D₅ : dummy Kabupaten Kebumen
- D₆ : dummy Kabupaten Purworejo

- D₇ : dummy Kabupaten Wonosobo
- D₈ : dummy Kabupaten Magelang
- D₉ : dummy Kabupaten Boyolali
- D₁₀ : dummy Kabupaten Klaten
- D₁₁ : dummy Kabupaten Sukoharjo
- D₁₂ : dummy Kabupaten Wonogiri
- D₁₃ : dummy Kabupaten Karanganyar
- D₁₄ : dummy Kabupaten Sragen
- D₁₅ : dummy Kabupaten Grobogan
- D₁₆ : dummy Kabupaten Blora
- D₁₇ : dummy Kabupaten Rembang
- D₁₈ : dummy Kabupaten Pati
- D₁₉ : dummy Kabupaten Kudus
- D₂₀ : dummy Kabupaten Jepara
- D₂₁ : dummy Kabupaten Demak
- D₂₂ : dummy Kabupaten Semarang
- D₂₃ : dummy Kabupaten Temanggung
- D₂₄ : dummy Kabupaten Kendal
- D₂₅ : dummy Kabupaten Batang
- D₂₆ : dummy Kabupaten Pekalongan
- D₂₇ : dummy Kabupaten Pemasang
- D₂₈ : dummy Kabupaten Tegal
- D₂₉ : dummy Kabupaten Brebes

D_{30} : dummy Kota Magelang

D_{31} : dummy Kota Surakarta

D_{32} : dummy Kota Salatiga

D_{33} : dummy Kota Pekalongan

D_{34} : dummy Kota Tegal

β_0 : intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi variabel bebas

$\alpha_1 - \alpha_{34}$: koefisien dummy wilayah

u_{it} : gangguan waktu t untuk unit cross section i

i : 1, 2, 3, ..., 34 (data *cross section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)

t : 1, 2, 3, ..., 34 (data *time series*, tahun 2005-2009)

3.4.2 Asumsi Model Regresi Linier Klasik

Sifat-sifat statistik yang membuat metode OLS menjadi populer hanya berlaku jika memenuhi asumsi-asumsi model regresi linier klasik. Asumsi tersebut adalah (Gujarati, 2003):

1. Model regresi linier dalam parameter.
2. Variabel independen adalah non stokastik (yaitu tetap dalam penyempelan berulang).
3. Nilai rata-rata bersyarat dari unsur gangguan populasi, u_i , tergantung pada nilai tertentu variabel independen adalah nol, atau $E(u_i|x_i) = 0$.
4. Varians bersyarat dari gangguan u_i adalah konstan dan sama untuk semua observasi (homoskedastik). $\text{Var}(u_i|x_i) = \sigma_i^2$.

5. Tidak ada autokorelasi dalam gangguan. $Cov(u_i, u_j) = 0$.
6. Jika X stokastik, X independen dari gangguan u_i atau $Cov(u_i, x_i) = 0$.
7. Jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabel independen.
8. Adanya variabilitas yang cukup dalam nilai X , artinya nilai X harus berbeda tidak boleh sama semua
9. Model regresi telah dispesifikasi dengan benar
10. Tidak ada multikolinieritas diantara variabel independen.

3.4.2.1 Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti ada hubungan linear yang ‘sempurna’ (pasti) di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model adalah sebagai berikut:

1. Mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R^2 .

Jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat multikolinieritas.

2. Melakukan regresi parsial.

Menggunakan *auxiliary regression* pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinieritas.

3.4.2.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedasitas berarti bahwa varians gangguan u_i tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedasitas juga bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi homoskedasitas yaitu gangguan u_i yang tercakup dalam fungsi regresi bersifat homoskedastis, artinya semua memiliki varians gangguan u_i yang sama. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedasitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (*asimtotik*).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas antara lain dengan menggunakan uji Park. Uji Park dapat menjelaskan apabila koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen bersifat signifikan (dengan tingkat kepercayaan 5%) maka data bersifat heteroskedasitas begitu pula sebaliknya.

3.4.2.3 Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara gangguan u_i pada periode t dengan gangguan u_i pada periode $t-1$. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS adalah tidak ada autokorelasi, yang dinyatakan:

$$E(u_i u_j) = 0 \text{ dan } i \neq j \dots\dots\dots (3.10)$$

Sedangkan apabila ada autokorelasi, maka dilambangkan:

$$E(u_i u_j) \neq 0 \text{ dan } i \neq j \dots\dots\dots (3.11)$$

Autokorelasi dapat berbentuk *autokorelasi positif* dan *autokorelasi negatif*. Dalam analisis runtut waktu lebih besar kemungkinan terjadi autokorelasi positif, karena variabel yang dianalisis biasanya mengandung kecenderungan meningkat.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- $0 < DW < 1,10$ berarti autokorelasi positif
- $1,10 < DW < 1,54$ tidak dapat diputuskan
- $1,54 < DW < 2,46$ berarti tidak ada autokorelasi
- $2,46 < DW < 2,90$ tidak dapat diputuskan
- $DW > 2,90$ berarti ada autokorelasi negatif

3.4.3 Uji Statistik

3.4.3.1 Uji Individual (uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, digunakan tingkat kepercayaan 5% dengan hipotesis:

Hipotesis 1

$H_0 : \beta_1 = 0$ Laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1 : \beta_1 < 0$ Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 2

$H_0 : \beta_2 = 0$ Angka Harapan Hidup tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1 : \beta_2 < 0$ Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 3

$H_0 : \beta_3 = 0$ Angka Melek Huruf tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1 : \beta_3 < 0$ Angka Melek Huruf berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 4

$H_0 : \beta_4 = 0$ Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1 : \beta_4 < 0$ Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 5

$H_0 : \beta_5 = 0$ Pengeluaran Perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1 : \beta_5 < 0$ Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 6

$H_0 : \beta_6 = 0$ Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

$H_1: \beta_6 > 0$ Jumlah penduduk berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Jateng

Hipotesis 7

$H_0: \alpha_1, \dots, \alpha_{34} = 0$ Tidak terdapat perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan antara Kota Semarang (*benchmark*) dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah

$H_1: \alpha_1, \dots, \alpha_{34} \neq 0$ Terdapat perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan antara Kota Semarang (*benchmark*) dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah

Dengan ketentuan H_0 ditolak bila nilai probabilitas dari t-statistik lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 5% dan H_0 diterima bila nilai probabilitas dari t-statistik lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 5%.

3.4.3.2 Pengujian Secara Serentak (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen/bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1, \dots, \beta_6, \alpha_1, \dots, \alpha_{34} = 0$ semua variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

$H_1: \beta_1, \dots, \beta_6, \alpha_1, \dots, \alpha_{34} \neq 0$ semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan F statistik dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F statistik dengan tingkat kepercayaan 5 % atau membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots (3.12)$$

Dimana:

R^2 : koefisien determinasi

K : jumlah variabel independen termasuk konstanta

N : jumlah sampel

Apabila nilai probabilitas F statistik < tingkat kepercayaan 5% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika, F statistik > tingkat kepercayaan 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya.

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, semakin baik. Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{(Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (3.13)$$

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.